

POSISI INDONESIA DALAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA: PERAN STRATEGIS, KONTRIBUSI GLOBAL DAN TANTANGAN DIPLOMATIK

Tri Wahyu Ningsih (2316041008)

Dela Amelia Putri (2316041016)

Lira Takarani Jusepa PW (2316041019)

Imelda Artamevia (2356041022)

ABSTRAK

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang memiliki peran sentral dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta mendukung kerja sama antarnegara dalam berbagai bidang global. Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif telah menempatkan PBB sebagai forum strategis dalam pelaksanaan diplomasi internasional. Paper ini bertujuan menganalisis posisi Indonesia dalam PBB melalui kajian terhadap peran strategis, kontribusi global, dan tantangan diplomatik yang dihadapi Indonesia dalam dinamika hubungan internasional kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Hasil kajian menunjukkan bahwa posisi Indonesia dalam PBB cukup signifikan, tercermin melalui keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan PBB, kontribusi pasukan penjaga perdamaian, dukungan terhadap dekolonisasi, komitmen terhadap isu Palestina, serta partisipasi aktif dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, Indonesia juga menghadapi tantangan diplomatik berupa rivalitas geopolitik global, keterbatasan pengaruh negara berkembang, serta tuntutan penguatan kapasitas diplomasi multilateral. Oleh karena itu, penguatan posisi Indonesia di PBB memerlukan konsistensi kebijakan luar negeri, penguatan diplomasi strategis, dan optimalisasi peran Indonesia sebagai *middle power* dalam tata kelola global.

Kata Kunci: Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, diplomasi, politik luar negeri, hubungan internasional.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan pada tahun 1945 sebagai respons atas kehancuran yang ditimbulkan Perang Dunia II dan sebagai instrumen kolektif untuk mencegah konflik berskala global. Sejak berdirinya, PBB berkembang tidak hanya sebagai organisasi keamanan kolektif, tetapi juga sebagai arena utama pembentukan norma internasional, penyelesaian sengketa, pembangunan, hak asasi manusia, dan kerja sama global.¹

Indonesia memiliki hubungan historis yang erat dengan PBB. Sejak awal kemerdekaan, PBB memiliki keterkaitan dengan perjuangan diplomatik Indonesia, termasuk melalui pembentukan Komisi Tiga Negara dan *United Nations Commission for Indonesia* (UNCI). Dalam perkembangannya, Indonesia tidak hanya menjadi anggota, tetapi juga berupaya menempatkan diri sebagai aktor aktif dalam sistem multilateral internasional.²

Posisi Indonesia dalam PBB tidak dapat dilepaskan dari prinsip politik luar negeri bebas aktif. Prinsip ini menghendaki Indonesia bebas menentukan sikap terhadap blok kekuatan dunia, namun aktif berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia. Dalam konteks ini, PBB menjadi wadah strategis bagi implementasi orientasi kebijakan luar negeri Indonesia.

Di tengah perubahan geopolitik global, meningkatnya konflik internasional, krisis kemanusiaan, perubahan iklim, dan ketimpangan pembangunan, posisi Indonesia dalam PBB semakin relevan untuk dikaji. Hal ini penting untuk memahami sejauh mana Indonesia berperan sebagai aktor strategis dalam tata kelola global.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana posisi Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa?
2. Bagaimana bentuk peran strategis dan kontribusi global Indonesia di PBB?

¹ Yusuf Hofni Junior Kilikily Hartana, "EKSISTENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM MEMELIHARA PERDAMAIAN DUNIA," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 528–34.

² Rizerius Eko Hadisancoko Ryanda Catur Arhanudya, Syaiful Anwar, "KONTRIBUSI INDONESIA DALAM OPERASI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)," *Communnity Development Journal* 4, no. 4 (2023): 9406–10.

3. Apa tantangan diplomatik yang dihadapi Indonesia dalam memperkuat posisinya di PBB?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah di atas, dapat dijabarkan tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Menganalisis posisi Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Mengkaji peran strategis dan kontribusi global Indonesia dalam PBB.
3. Mengidentifikasi tantangan diplomatik Indonesia dalam forum multilateral internasional.

II. TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Politik luar negeri bebas aktif merupakan doktrin fundamental dalam hubungan luar negeri Indonesia. Prinsip bebas berarti Indonesia tidak terikat pada kekuatan blok manapun, sedangkan aktif berarti Indonesia berperan dalam menciptakan perdamaian dan keadilan internasional. Doktrin ini menjadi landasan normatif keterlibatan Indonesia dalam PBB.³

B. Konsep *Middle Power Diplomacy*

Indonesia kerap dikategorikan sebagai middle power, yakni negara dengan kapasitas memengaruhi isu internasional melalui diplomasi, koalisi, dan mediasi, meskipun bukan kekuatan besar. Dalam konteks PBB, posisi ini tercermin melalui peran Indonesia dalam peacekeeping, negosiasi multilateral, dan advokasi isu negara berkembang.⁴

C. Teori Organisasi Internasional

Teori organisasi internasional menjelaskan bahwa organisasi internasional berfungsi sebagai instrumen kerja sama antarnegara, forum penyelesaian sengketa, dan sarana pembentukan norma global. Dalam perspektif ini, PBB bukan sekadar wadah administratif, tetapi institusi

³ Falhan Hakiki Dzikiara Pesona Sadewa, "DINAMIKA KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF INDONESIA MELALUI GERAKAN NON-BLOK (GNB) FREE ACTIVE FOREIGN POLICY DYNAMICS OF INDONESIA THROUGH THE NON- ALIGNED MOVEMENT (NAM)," *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (2022): 13–28.

⁴ Albert Triwibowo and Jessica Martha, "Diplomasi Middle-Power Indonesia Di Masa Pandemi," *Indonesian Perspective* 6, no. 2 (2021): 123–41.

yang memengaruhi perilaku negara melalui aturan, mekanisme, dan legitimasi internasional. Teori ini relevan untuk memahami bagaimana Indonesia memanfaatkan PBB sebagai arena diplomasi untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi pada kepentingan global.⁵

D. Teori Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Teori kepentingan nasional menegaskan bahwa setiap kebijakan luar negeri negara pada dasarnya diarahkan untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional. Dalam konteks Indonesia di PBB, keterlibatan Indonesia dalam isu perdamaian, keamanan, pembangunan, dan kemanusiaan juga berkaitan dengan kepentingan strategis Indonesia, baik dalam menjaga stabilitas nasional, meningkatkan reputasi internasional, maupun memperkuat posisi tawar diplomatik di tingkat global.⁶

E. Teori Diplomasi Multilateral

Teori diplomasi multilateral menjelaskan bahwa hubungan antarnegara dalam forum internasional dibangun melalui negosiasi kolektif, pembentukan konsensus, dan kerja sama lintas negara. Dalam konteks PBB, teori ini penting untuk menganalisis strategi Indonesia dalam membangun koalisi, memperjuangkan agenda negara berkembang, dan menjalankan peran sebagai mediator dalam berbagai isu global. Melalui pendekatan ini, Indonesia dapat dipahami tidak hanya sebagai peserta forum internasional, tetapi juga sebagai aktor yang berupaya membentuk arah kebijakan global.⁷

III. PEMBAHASAN

A. Posisi Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Indonesia resmi menjadi anggota PBB pada 28 September 1950. Keanggotaan ini menandai integrasi Indonesia ke dalam masyarakat internasional pascakemerdekaan. Meski pernah

⁵ Putri Tiara Sari Carissa Adelia Z, Auroria Salsabila A, "Peran Organisasi Internasional Di Dalam Suatu Negara," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2024): 121–26.

⁶ Junita Budi Rachman Arry Bainus, "Kepentingan Nasional Dalam Hubungan Internasional," *Intermestic: Journal of International Studies* 2, no. 2 (2018): 109–15, <https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.1>.

⁷ Moh.Naufal Muhamad Karang Seto, Zelda Nurarin Trianditi Wicaksono and Nathaniel Gabe Sahala Panjaitan Effendy, "PRAKTIK KOMUNIKASI DIPLOMATIK ASEAN DALAM PERTEMUAN MULTILATERAL : ANALISIS TEORI DIPLOMASI DAN BAHASA DIPLOMASI," *Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2025): 649–70.

menarik diri dari PBB tahun 1965 sebagai bentuk protes politik, Indonesia kembali bergabung tahun 1966 dan sejak itu terus aktif dalam berbagai organ PBB.

Posisi Indonesia dalam PBB dapat dilihat dari beberapa dimensi. Pertama, dimensi politik, yakni keterlibatan Indonesia dalam proses pengambilan keputusan global, termasuk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kedua, dimensi normatif, yaitu kontribusi Indonesia dalam pengembangan norma internasional seperti dekolonisasi, hak menentukan nasib sendiri, dan pembangunan berkelanjutan. Ketiga, dimensi operasional, melalui partisipasi dalam misi penjaga perdamaian dan lembaga-lembaga PBB.

Indonesia telah beberapa kali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yang menunjukkan pengakuan internasional atas kredibilitas diplomasi Indonesia. Kepercayaan ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor penting di kawasan maupun tingkat global.⁸

B. Peran Strategis Indonesia dalam PBB

Sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki posisi penting dalam percaturan internasional, Indonesia menjalankan peran strategis di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui berbagai kontribusi nyata yang mencerminkan komitmen terhadap perdamaian dunia, keadilan internasional, dan pembangunan global berkelanjutan. Peran tersebut tidak hanya diwujudkan melalui keterlibatan diplomatik dalam forum-forum multilateral, tetapi juga melalui partisipasi aktif dalam penyelesaian konflik, advokasi isu-isu kemanusiaan, serta kontribusi terhadap agenda pembangunan internasional. Dalam konteks tersebut, posisi Indonesia di PBB dapat dilihat melalui beberapa peran strategis berikut.⁹

1. Peran dalam Perdamaian dan Keamanan Internasional

Salah satu peran strategis Indonesia adalah kontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia. Melalui Kontingen Garuda, Indonesia secara konsisten mengirim personel ke berbagai misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon, Kongo, Sudan, dan wilayah konflik lainnya.

⁸ Levina Yustitianiingtyas, L Ya Esty Pratiwi, and Dewi Setyowati, "Posisi Indonesia Pada Organisasi Internasional : Peran Strategis Dalam Pembentukan Hukum Internasional," *Prosiding Seminar Hukum Aktual 1*, no. 1 (2022): 1–13.

⁹ Leonard F. Hutabarat, "DIPLOMASI INDONESIA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB INDONESIAN DIPLOMACY IN THE UNITED NATIONS PEACEKEEPING MISSIONS," *Jurnal Pertahanan* 6, no. 2 (2014): 75–96.

Kontribusi ini bukan hanya menunjukkan komitmen terhadap perdamaian internasional, tetapi juga memperkuat posisi diplomatik Indonesia sebagai negara yang memiliki kredibilitas dalam isu keamanan global.

2. Peran dalam Isu Palestina

Indonesia secara konsisten menggunakan forum PBB untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan ini diwujudkan melalui diplomasi di Majelis Umum PBB, Dewan HAM PBB, dan berbagai forum multilateral lain.

Sikap Indonesia dalam isu Palestina mencerminkan posisi normatif Indonesia yang berorientasi pada anti-kolonialisme, keadilan internasional, dan penghormatan hak menentukan nasib sendiri.

3. Peran dalam Agenda Pembangunan Global

Indonesia aktif mendukung implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam berbagai forum PBB, Indonesia berperan dalam isu pembangunan inklusif, ketahanan pangan, transisi energi, dan perubahan iklim.

Keterlibatan ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia di PBB tidak terbatas pada isu politik dan keamanan, tetapi juga meluas ke agenda pembangunan global.

C. Kontribusi Global Indonesia di PBB

Kontribusi global Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat dilihat dalam tiga bentuk utama, yaitu kontribusi diplomatik, kontribusi normatif, dan kontribusi operasional. Ketiga bentuk kontribusi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam PBB tidak hanya bersifat formal sebagai negara anggota, tetapi juga substantif dalam mendukung terciptanya tata dunia yang lebih damai, adil, dan berimbang. Melalui berbagai forum dan mekanisme PBB, Indonesia berupaya menempatkan diri sebagai aktor yang aktif dalam merespons berbagai persoalan global, baik di bidang keamanan, pembangunan, maupun perlindungan hak asasi manusia.

Pertama, kontribusi diplomatik Indonesia tercermin melalui peran aktif dalam mediasi, fasilitasi dialog, dan pembangunan konsensus di forum multilateral. Indonesia kerap memainkan peran sebagai *bridge-builder* atau jembatan diplomatik dalam menjembatani kepentingan negara-negara maju dan berkembang, termasuk dalam isu perdamaian

internasional, dekolonisasi, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Peran diplomatik ini juga terlihat ketika Indonesia beberapa kali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, di mana Indonesia mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan dialogis, menekankan penghormatan terhadap hukum internasional, dan mengedepankan solusi damai atas berbagai sengketa internasional. Posisi ini memperlihatkan kapasitas Indonesia sebagai aktor diplomasi yang tidak hanya merepresentasikan kepentingan nasional, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas internasional.

Kedua, kontribusi normatif Indonesia tampak melalui advokasi terhadap reformasi tata kelola global, termasuk reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih demokratis dan representatif, khususnya bagi negara-negara berkembang. Indonesia secara konsisten mendorong pembaruan struktur dan mekanisme pengambilan keputusan global yang dinilai masih didominasi oleh negara-negara besar. Selain itu, Indonesia aktif mengusung berbagai norma internasional yang berkaitan dengan perdamaian, penghormatan terhadap kedaulatan negara, penyelesaian sengketa secara damai, serta penguatan multilateralisme. Dalam konteks ini, Indonesia tidak hanya berpartisipasi sebagai penerima norma, tetapi juga sebagai pembentuk norma (norm entrepreneur) yang turut memengaruhi arah perkembangan hukum dan tata kelola internasional.

Ketiga, kontribusi operasional Indonesia tercermin melalui keterlibatan langsung dalam misi perdamaian, bantuan kemanusiaan, dan kerja sama pembangunan di bawah kerangka PBB. Salah satu bentuk nyata kontribusi ini adalah partisipasi Indonesia dalam misi penjaga perdamaian PBB melalui pengiriman Pasukan Garuda ke berbagai wilayah konflik. Keterlibatan tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana amanat konstitusi. Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam berbagai program kemanusiaan, penanganan bencana, dan dukungan terhadap agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), baik melalui kerja sama bilateral maupun melalui mekanisme multilateral PBB. Kontribusi operasional ini memperkuat legitimasi Indonesia sebagai negara yang tidak hanya berperan dalam tataran wacana, tetapi juga dalam implementasi nyata di lapangan.

Di samping ketiga bentuk kontribusi tersebut, Indonesia juga dikenal aktif membawa kepentingan *Global South* dalam berbagai perundingan internasional. Indonesia secara konsisten mengadvokasi isu kesenjangan pembangunan, keadilan ekonomi global, akses teknologi, serta perlindungan terhadap kepentingan negara berkembang. Peran ini memperkuat

identitas Indonesia sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang, sekaligus menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai kekuatan menengah yang memiliki pengaruh dalam pembentukan agenda global. Dengan demikian, kontribusi global Indonesia di PBB tidak hanya menunjukkan partisipasi aktif dalam sistem internasional, tetapi juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam membangun tatanan dunia yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

D. Tantangan Diplomati Indonesia dalam PBB

1. Rivalitas Geopolitik Global

Persaingan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia kerap memengaruhi efektivitas sistem PBB. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk menjaga independensi diplomati sekaligus tetap efektif memainkan peran strategis.

2. Keterbatasan Pengaruh Negara Berkembang

Meskipun aktif, pengaruh Indonesia tetap menghadapi keterbatasan struktural, terutama dalam isu yang sangat dipengaruhi veto negara permanen Dewan Keamanan.

Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan institusional yang memengaruhi optimalisasi peran negara berkembang dalam PBB.

3. Tantangan Penguatan Kapasitas Diplomasi

Dinamika isu global yang semakin kompleks menuntut kapasitas diplomasi yang semakin adaptif, termasuk penguatan negosiasi, strategi diplomasi digital, dan peningkatan posisi tawar Indonesia di forum multilateral.

E. Analisis Kritis atas Posisi Indonesia di PBB

Secara umum, posisi Indonesia di PBB cukup kuat dalam dimensi legitimasi, kontribusi, dan reputasi internasional. Namun, kekuatan tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi pengaruh substantif dalam pembentukan kebijakan global.

Indonesia masih cenderung kuat dalam diplomasi normatif, tetapi belum optimal dalam diplomasi struktural yang mampu memengaruhi reformasi institusi global. Dalam konteks ini,

penguatan posisi Indonesia memerlukan transformasi dari sekadar active participant menjadi agenda setter dalam sistem PBB.

Sebagai *middle power*, Indonesia memiliki peluang besar memainkan peran strategis melalui koalisi Selatan-Selatan, penguatan ASEAN centrality, dan diplomasi berbasis solusi terhadap isu global.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Posisi Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan peran yang signifikan sebagai aktor diplomatik dalam sistem multilateral internasional. Melalui politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak hanya berpartisipasi sebagai anggota, tetapi juga berkontribusi dalam isu perdamaian, pembangunan global, hak asasi manusia, dan reformasi tata kelola internasional.

Peran strategis Indonesia tercermin melalui keterlibatan dalam Dewan Keamanan PBB, misi penjaga perdamaian, dukungan terhadap Palestina, dan agenda pembangunan berkelanjutan. Namun, tantangan berupa rivalitas geopolitik, keterbatasan pengaruh struktural, dan kebutuhan penguatan kapasitas diplomasi menunjukkan bahwa posisi Indonesia masih perlu terus diperkuat.

B. Saran

Indonesia perlu memperkuat strategi diplomasi multilateral yang lebih proaktif dan substantif agar mampu meningkatkan pengaruh dalam pembentukan kebijakan global. Selain itu, diperlukan konsistensi dalam mendorong reformasi PBB, memperluas koalisi diplomatik dengan negara berkembang, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan diplomasi Indonesia agar mampu memainkan peran lebih besar sebagai agenda setter dalam tata kelola global.

DAFTAR PUSTAKA

- Arry Bainus, Junita Budi Rachman. "Kepentingan Nasional Dalam Hubungan Internasional." *Intermestic: Journal of International Studies* 2, no. 2 (2018): 109–15. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.1>.
- Carissa Adelia Z, Auroria Salsabila A, Putri Tiara Sari. "Peran Organisasi Internasional Di Dalam Suatu Negara." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2024): 121–26.
- Dzikiara Pesona Sadewa, Falhan Hakiki. "DINAMIKA KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF INDONESIA MELALUI GERAKAN NON-BLOK (GNB) FREE ACTIVE FOREIGN POLICY DYNAMICS OF INDONESIA THROUGH THE NON- ALIGNED MOVEMENT (NAM)." *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (2022): 13–28.
- Hartana, Yusuf Hofni Junior Kilikily. "EKSISTENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM MEMELIHARA PERDAMAIAN DUNIA." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 528–34.
- Hutabarat, Leonard F. "DIPLOMASI INDONESIA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB INDONESIAN DIPLOMACY IN THE UNITED NATIONS PEACEKEEPING MISSIONS." *Jurnal Pertahanan* 6, no. 2 (2014): 75–96.
- Muhamad Karang Seto, Zelda Nurarin Trianditi Wicaksono, Moh.Naufal, and Nathaniel Gabe Sahala Panjaitan Effendy. "PRAKTIK KOMUNIKASI DIPLOMATIK ASEAN DALAM PERTEMUAN MULTILATERAL : ANALISIS TEORI DIPLOMASI DAN BAHASA DIPLOMASI." *Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2025): 649–70.
- Ryanda Catur Arhanudya, Syaiful Anwar, Rizerius Eko Hadisancoko. "KONTRIBUSI INDONESIA DALAM OPERASI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)." *Communnity Development Journal* 4, no. 4 (2023): 9406–10.
- Triwibowo, Albert, and Jessica Martha. "Diplomasi Middle-Power Indonesia Di Masa Pandemi." *Indonesian Perspective* 6, no. 2 (2021): 123–41.
- Yustitiantingtyas, Levina, L Ya Esty Pratiwi, and Dewi Setyowati. "Posisi Indonesia Pada Organisasi Internasional : Peran Strategis Dalam Pembentukan Hukum Internasional." *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 1, no. 1 (2022): 1–13.